

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN DIPLOMATIK QATAR DAN IRAN

Hubungan diplomatik diantara negara satu dengan negara lainnya dapatlah berubah – ubah dan pasti mengalami suatu dinamika mengikuti perkembangan perpolitikan yang ada dalam kawasan maupun internasional. Begitu pula dengan hubungan antara Qatar dan Iran, sebuah hubungan diplomatik yang telah terjalin erat khususnya di bidang ekonomi gas dan minyak bumi antara kedua negara tidak menjamin bahwa hubungan diantara kedua negara tersebut akan selalu berjalan dengan baik dan lancar.

A. Harmonisasi Hubungan Bilateral Qatar dan Iran

Hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya suatu hubungan ekonomi, budaya, keamanan dan politik di antara dua negara. Qatar yang menjadi salah satu negara di kawasan Teluk, memiliki hubungan bilateral yang baik dengan beberapa negara tetangganya, salah satunya dengan negara Republik Islam Iran. Qatar memiliki sebuah kedutaan di Teheran sementara Iran juga memiliki sebuah kedutaan di negara Qatar, tepatnya di Doha. Sejak tahun 2010 Qatar dan Iran memang saling memperdalam hubungan bilateral mereka, dengan menandatangani sebuah pakta yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara dalam memerangi penyelundupan dan obat-obatan terlarang, pemalsuan, dan pencucian uang (Mehr, 2010).

Pada tahun 2014, dalam upaya untuk memperluas hubungan perdagangan dan ekonomi, bersamaan dengan penandatanganan beberapa protokol keamanan, kedua negara mengumumkan pembentukan tiga zona perdagangan bebas-gabungan, satu terletak di kota pelabuhan Bushehr di Iran dan dua lainnya di Qatar, di Doha dan pelabuhan Al-Ruwais. Pada

tahun 2015, perdagangan Qatar-Iran diperkirakan sekitar \$ 500 juta (Kamrava, Iran-Qatar Relations, 2017, pp. 167-187).

Qatar dan Iran sama-sama memiliki ladang Gas-Kondensat Selatan Pars / *North Dome*, lapangan gas terbesar di dunia, yang memiliki pengaruh besar dalam hubungan Qatar dan Iran. *North Field dan South Pars* yang biasa juga disebut Lapangan Utara (Qatar) dan Pars Selatan (Iran) berada di antara batas Qatar dan Iran. Ladang gas tersebut mencakup 97.000 km² dengan mayoritas (sekitar dua pertiga) terbaring di perairan Qatar (Times, 2009). Qatar dan Iran bersama-sama saling mengontrol ladang gas alam tersebut. Qatar yang memiliki 13% cadangan gas di dunia dan memproduksi 650 juta meter kubik gas per hari dari bagian ladangnya, sedangkan Iran dapat memproduksi hingga 5.750 juta meter kubik gas dari ladangnya tersebut (World, 2015).

Ladang Gas-Kondensat Selatan Pars / *North Dome* adalah ladang kondensat gas alam yang terletak di Teluk Persia. Ini adalah ladang gas alam terbesar di dunia (IEA, 2008, p. 298), dengan kepemilikan lapangan yang dibagi antara Iran dan Qatar (Haaretz & Reuters, 2017). Pada daftar ladang gas alam, ladang gas ini memiliki cadangan yang dapat dipulihkan lebih banyak daripada gabungan bidang lainnya. Ini memiliki pengaruh geostrategis yang signifikan (Kennedy Jr, 2016).

Lapangan gas ini mencakup area seluas 9.700 km² (3.700 sq mi), yang 3.700 km² (1.400 sq mi) (wilayah selatan) berada di perairan teritorial Iran dan 6.000 km² (2.300 sq mi) (*North Dome*) berada di Perairan teritorial Qatar (Chabrelié, pp. 1-12).

Gambar 1.1
Ladang Gas Bersama Qatar – Iran



Sumber : <http://caspiabarrel.org>

Cadangan gas yang dapat dipulihkan lapangan setara dengan sekitar 215 miliar barel ($34,2$ miliar m^3) minyak dan juga memiliki sekitar 16 miliar barel ($2,5$ miliar m^3) kondensat yang dapat dipulihkan yang sesuai dengan sekitar 230 miliar barel (37 miliar m^3) dari minyak setara yang dapat dipulihkan hidrokarbon. Faktor pemulihan gas dari lapangan adalah sekitar 70%, sesuai dari sekitar 1.260 triliun ($36 \times 10^{12} m^3$) dari total cadangan gas dipulihkan yang merupakan singkatan dari sekitar 19% dari cadangan gas dipulihkan dunia (Eni, 2006).

Perkiraan untuk bagian Iran adalah 500 triliun ($14 \times 10^{12} m^3$) gas alam dan sekitar 360 triliun ($10 \times 10^{12} m^3$) gas yang dapat dipulihkan yang merupakan 36% dari total Iran yang terbukti cadangan gas dan 5,6% cadangan gas dunia yang terbukti (Entrepreneur, 2007). Perkiraan untuk bagian Qatar adalah 900 triliun ($25 \times 10^{12} m^3$) gas yang dapat dipulihkan yang merupakan hampir 99% cadangan gas terbukti Qatar dan 14% dari cadangan gas yang terbukti di dunia (Petroleum, 2005).

Qatar dan Iran saat ini juga terikat dalam MoU kerjasama di bidang transit barang yang dimana juga

melibatkan Negara Turki, berdasarkan MoU yang sudah ditandatangani tersebut, Iran, Turki dan Qatar membentuk kelompok kerja gabungan untuk memfasilitasi keluar dan masuknya barang dan transit produksi ketiga negara tersebut. MoU itu juga mempercepat jalur perluasan hubungan ekonomi antara Iran, Turki dan Qatar, dan menghapus hambatan pengiriman barang Iran dan Turki ke Qatar (Pars Today, 2017).

Dalam sektor keamanan negara, Qatar dan Iran juga saling menjalin hubungan yang cukup baik seperti halnya, Menteri Dalam Negeri Iran, mengumumkan bahwa Iran telah menandatangani kesepakatan keamanan dengan Qatar. Menurut laporan kesepakatan tersebut berisikan melindungi perbatasan, memerangi kejahatan terorganisir, perdagangan manusia, dan obat-obatan yang dimana semuanya adalah tujuan dari kesepakatan tersebut (Teheran Times, 2011).

Setelah adanya kesepakatan tersebut Komando Pasukan Pelindung Garda Revolusi Islam (IRGC-N) Ali Reza Tangsiri mengumumkan bahwa IRGC telah mengirim armada kapal ke Qatar melalui sebuah “misi observatorium angkatan laut”. Armada yang dikirim tersebut terdiri dari tiga kapal PT yang dilengkapi rudal dan dua kapal pendukung. Delegasi IRGC tersebut dijadwalkan dan ditugaskan untuk memeriksa fasilitas militer Qatar (Fars News Agency, 2010).

Kerjasama dalam bidang keamanan juga semakin diperluas dimana ada kesepakatan yang di tandatangani oleh kedua pihak yang berisikan tentang perbatasan kedua negara tersebut dan juga kesepakatan tersebut dirancang untuk memperbaiki usaha pengendalian perairan territorial (Fars News Agency, 2009).

Qatar dan Iran juga saling berkerjasama di bidang budaya dengan saling mengadakan pertukaran kebudayaan, yang dimana Qatar pernah menjadi tuan rumah pameran seni yang berasal dari Iran. Pameran tersebut berjudul “*A Manifestation of Iranian Art*”, karya – karya yang dipajang selama pameran tersebut berasal dari seniman asal Iran Morteza Atash-Panjeh. Ada sekitar 40 karya yang ditampilkan

pada pameran tersebut yang dimana karya – karya tersebut merupakan seni tradisional yang berasal dari Iran (The Iran Project, 2017).

B. Memburuknya Hubungan Diplomatik Qatar dan Iran

Hubungan antara Qatar dan Iran, merupakan sebuah hubungan diplomatik yang telah terjalin erat khususnya di bidang ekonomi gas dan minyak bumi antar kedua Negara. Namun hal tersebut tidak menjamin bahwa hubungan diantara kedua negara tersebut akan selalu berjalan dengan baik dan lancar.

Hubungan Qatar dan Iran sempat memburuk disaat krisis diplomatik Iran yang terjadi pada awal tahun 2016, dimana negara-negara yang berada di kawasan Teluk memutuskan hubungannya dengan Iran menyusul serangan terhadap misi diplomatik Arab Saudi di Iran. Krisis diplomatik Iran terjadi karena adanya aksi pemberontakan dan penyerangan yang dilakukan sejumlah warga Iran di kantor kedutaan besar Arab Saudi di Teheran, warga Iran tersebut tidak terima dengan putusan hukuman mati terhadap ulama syiah asal Iran yaitu Nimr al-Nimr, akibat dari adanya penyerangan tersebut membuat beberapa Negara di kawasan Teluk memilih untuk memutuskan hubungan diplomatik terhadap Negara Iran (BBC Indonesia, 2016).

Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, tindakan penyerangan yang dilakukan oleh warga Iran tersebut tidaklah sesuai dan bahkan melanggar norma internasional yang sudah mengatur tentang perlindungan misi diplomatik yang berada di

suatu Negara. Norma internasional tentang perlindungan misi diplomatik tersebut berisikan seperti :

1. Perlindungan terhadap aset dan properti dari organisasi internasional di negara penerima.
2. Perlindungan mutlak terhadap pejabat dan staf diplomatik dari organisasi internasional di negara penerima dalam hal sedang melaksanakan tugasnya.
3. Perlindungan terhadap sarana komunikasi dan pengakuan akan hak *extraterritorial* oleh negara penerima.
4. Adanya kemungkinan untuk mengabaikan hak atas kekebalan dan keistimewaan diplomatik terhadap pejabat dan staf diplomatik dari suatu organisasi internasional (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961).

Qatar menjadi salah satu negara yang mengecam serangan tersebut dan Qatar juga memanggil duta besarnya pada 6 Januari 2016 untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan negara Iran. Disaat yang bersamaan juga Kementerian Luar Negeri Qatar mengeluarkan sebuah pernyataan protes ke kedutaan Iran di Doha yang mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap piagam dan norma internasional yang menekankan perlindungan misi diplomatik dan staf (Reuters S. , 2016).

Qatar juga sempat merasakan krisis diplomatik, yang dimana krisis tersebut bermula pada tanggal 5 Juni 2017 ketika beberapa negara secara tiba – tiba memutuskan hubungan diplomatiknya dengan negara Qatar. Negara-negara tersebut ialah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Maladewa. Pemutusan hubungan diplomatik tersebut termasuk penarikan duta besar yang ada, serta memberlakukan larangan perdagangan dan perjalanan antar negara yang bersangkutan. Arab Saudi dan negara-negara lain tersebut mengkritik media Al Jazeera dan hubungan Qatar terhadap Iran, dan juga menuduh Qatar turut mendanai organisasi teroris. Namun dari pihak Qatar sendiri dalam menanggapi semua tanggapan itu ialah dengan membantah

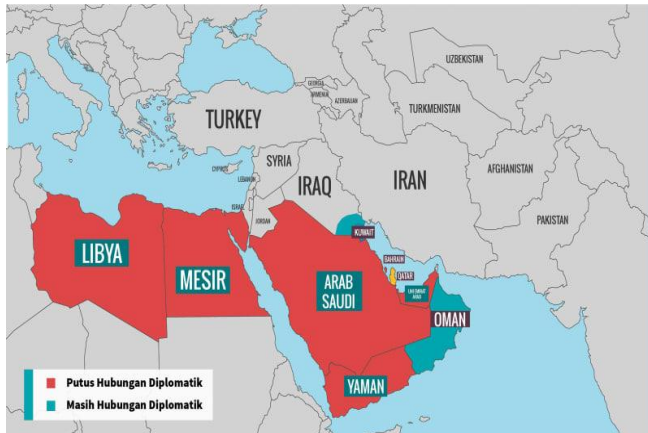
keras bahwa Qatar mendukung terorisme, mengingatkan bahwa pihaknya telah membantu Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme dan intervensi militer terhadap NIIS yang sedang terjadi. Bahkan hal itu sampe membuat beberapa negara bereaksi, seperti halnya Turki, Rusia, dan Iran telah menyerukan untuk menyelesaikan krisis tersebut melalui sebuah dialog. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump awalnya hanya mengkritik Qatar dan lebih condong ke pihak Arab Saudi, namun sehari kemudian berbalik arah dalam sebuah pembicaraan telepon dengan Emir Qatar untuk membantu para negara yang bersangkutan agar dapat cepat menyelesaikan permasalahan yang ada (Gaouette & Browne, 2017).

C. Qatar Memulihkan Hubungan Diplomatiknya Terhadap Iran

Pada bulan Agustus 2017, Pemerintah Qatar mengambil langkah untuk memulihkan hubungan diplomatiknya terhadap Iran dimana pada saat sebelumnya Qatar juga sempat mengalami krisis diplomatik di awal hingga pertengahan tahun 2017, dimana saat itu negara – negara koalisi Arab Saudi atau yang berada di kawasan Teluk satu per satu memutuskan hubungan diplomatiknya terhadap negara Qatar, beberapa negara tersebut termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir.

Gambar 2.1

Peta Hubungan Diplomatik Negara Teluk dan Qatar



Sumber : <https://kumparan.com>

Adapun beberapa peristiwa dan alasan yang membuat negara – negara Teluk memilih untuk memutuskan hubungan dengan Qatar, seperti :

Peristiwa pertama yaitu Qatar dituding terlibat dalam kesepakatan bersama militan Sunni dan Syiah Pada pertengahan tahun 2017 tepatnya bulan April, Qatar dituding terlibat dalam sebuah kesepakatan dengan militan Sunni dan Syiah di Irak dan Suriah. Di dalam kesepakatan tersebut terdapat dua tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kembalinya 26 sandera yang berasal dari negara Qatar (termasuk para anggota kerajaan Qatar) yang telah diculik oleh militan Syiah dan ditahan selama lebih dari 16 bulan. Tujuan yang kedua adalah agar militan Sunni dan Syiah di Suriah mengizinkan bantuan kemanusiaan dan evakuasi warga sipil yang aman (Arango, 2017).

Arab Saudi dan UEA marah besar dengan hal tersebut karena ada sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak Qatar untuk mencapai sebuah kesepakatan tersebut. Arab Saudi dan UEA menuding pemerintah Qatar harus membayar sekitar \$700 juta untuk militan Syiah yang dimana juga didukung oleh negara Iran, dengan rincian uang sebesar \$120-140 juta kepada Tahrir al-Sham, dan sebesar \$80 juta diberikan kepada Ahrar al-Sham (Solomon, 2017).

Alasan kedua ialah saat peristiwa peretasan situs website Qatar, situs web *Qatar News Agency* (QNA) diduga diretas pada bulan Mei 2017. Menurut stasiun televisi Al Jazeera yang berpusat di Qatar, sang peretas menulis komentar palsu di situs *Qatar News Agency* yang dikaitkan dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yang menyatakan dukungannya untuk Iran, Hizbullah, Hamas, dan Israel. Di dalam situs tersebut Emir mengatakan, "Iran mewakili kekuatan regional dan Islam yang tidak dapat diabaikan dan tidak bijaksana apabila melawannya. Iran merupakan kekuatan besar dalam stabilisasi kawasan ini." Qatar sempat melaporkan bahwa pernyataan tersebut bohong dan tidak mengetahui asal usulnya dari mana (Barnard & Kirkpatrick, 2017). Meskipun demikian, komentar atau pernyataan tersebut sudah terlanjur dipublikasikan secara luas di berbagai media berita Arab, termasuk Sky News Arabia yang berpusat di UEA dan Al Arabiya (Al Jazeera, 2017).

Alasan ketiga yaitu dimana Qatar bersikap pragmatis, Qatar adalah negara Timur Tengah pertama yang mengerahkan jet tempurnya untuk ambil bagian dalam operasi militer untuk menggulingkan pemerintahan M. Gaddafi. Qatar juga adalah negara yang pertama dan yang secara terbuka pula mendukung militer Arab Saudi yang memasuki kawasan Suriah. Namun, pada saat yang sama, Qatar juga menerima negara Iran, negara yang mayoritas menganut aliran Syiah dan memiliki hubungan yang berlawanan terhadap negara Arab Saudi. Sikap seperti ini sedikit berbeda dengan perilaku negara – negara Timur Tengah lainnya, dan karena ini pula, banyak

negara tetangga Qatar yang tersinggung. Perilaku seperti ini yang tidak dapat diterima di mata Arab Saudi dan negara – negara lain. Setelah negara – negara lainnya gregetan beberapa lama kemudian, konflik akhirnya meletus. Pihak Arab Saudi dan negara – negara lain langsung mengambil langkah untuk memutuskan hubungan bersama-sama dengan Qatar dan ini juga adalah suatu hukuman kepada negara Qatar, yang selama ini dianggap menjadi duri dalam daging mereka (Tjoa, 2017).

Alasan keempat ialah keinginan negara Qatar yang ingin menjadi negara “Lebih” di kawasan Teluk serta Qatar yang berkeinginan juga untuk menjadi seperti Amerika Serikat ataupun seperti negara China. Qatar, sangat ingin bisa seperti negara – negara Teluk lain yang punya pengaruh luas di mata dunia internasional. Maka yang dilakukan oleh Qatar ialah seperti membangun “*hard power*” dengan mencoba untuk beraliansi bersama negara Amerika Serikat lewat pembangunan pangkalan militer di negaranya, Qatar juga turut mencoba membangun pondasi untuk “*soft power*” mereka lewat pengaruh di bidang – bidang non militer. Qatar perlahan mencoba untuk meninggalkan pengaruh di politik regional mereka atau yang ada di kawasan Teluk tersebut (Kumparan, 2017).

Krisis diplomatik yang dialami oleh Qatar tersebut menghasilkan dampak yang cukup terasa untuk negara Qatar itu sendiri, seperti halnya di sektor penerbangan, pelayaran, pangan, serta pelarangan sejumlah media asal Qatar. Di sektor penerbangan dampak yang begitu terasa bagi Qatar ialah pelarangan penerbangan sejumlah maskapai besar ke dan dari wilayah Qatar itu sendiri, maskapai besar yang dilarang tersebut termasuk *Emirates Airways*, *Gulf Air*, *Egypt Air*, *Fly Dubai*, *Air Arabia*, *Saudi Arabian Airlines*, *Etihad Airways*, dan *Royal Air Maroc*. Negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir bahkan juga melarang sejumlah penerbangan transit yang dilakukan oleh pesawat udara yang terdaftar di Qatar. *Qatar Airways* selaku maskapai penerbangan yang berasal dari negara Qatar pun harus merespon pelarangan penerbangan tersebut dengan mengubah jalur penerbangannya

melewati negara Iran. *Qatar Airways* tidak hanya merespon dengan mengubah jalur penerbangan saja namun pihak *Qatar Airways* juga melakukan sejumlah penangguhan operasi penerbangan mereka ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain (Al Jazeera, 2017).

Letak geografis negara Qatar yang diapit oleh Arab Saudi, Bahrain dan UAE membuat maskapai Qatar dalam posisi yang cukup sulit terlebih dalam menjalankan rute penerbangannya. Qatar terjepit di antara negara Teluk tersebut, akan tetapi Qatar masih dapat bernafas lega lantaran Iran yang berada di sisi utara tak menutup jalur udaranya bagi maskapai Qatar. Satu-satunya bagi maskapai Qatar dalam menuju ke negara lainnya akhirnya bertumpu pada negara Iran. Sebelum diblokade, maskapai Qatar sangat mengandalkan wilayah atau rute udara Arab Saudi yang membentang di sisi selatan Qatar. Wilayah udara Arab Saudi sering dilewati maskapai Qatar, terutama untuk penerbangan ke negara-negara yang ada di Benua Afrika (Debora, Iran Menjadi Satu-Satunya Pintu Masuk ke Qatar, 2017).

Gambar 3.1

Jalur Penerbangan Maskapai Qatar



Sumber : www.tirtto.id

Di sektor pelayaran, kapal yang berbendera Qatar dilarang oleh Uni Emirat Arab untuk menyinggahi Fujairah yang dimana berada di wilayah Uni Emirat Arab. UEA juga melarang kapal – kapal Qatar dari pelabuhan dan kapal – kapal yang berada di pelabuhan UEA berlayar langsung menuju ke negara Qatar. Pembatasan serupa juga diberlakukan oleh sejumlah negara Teluk lainnya seperti Bahrain, Mesir, dan Arab Saudi dimana negara Teluk tersebut juga melarang kapal – kapal yang berbendera Qatar berlayar dari pelabuhan mereka. Hal ini juga mengakibatkan raksasa

pelayaran Maersk tidak dapat masuk atau keluar dari wilayah Qatar sepenuhnya, karena kapal kargo besar tersebut diminta untuk berlabuh ke Jebel Ali atau berlabuh ke arah pelabuhan terdekat lainnya (World Maritime News, 2017).

Di sektor media juga menimbulkan dampak yang cukup terasa untuk Qatar seperti halnya sejumlah negara yang memutuskan hubungan terhadap Qatar yaitu negara Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan UEA melakukan pemblokiran akses ke situs berita Qatar yaitu Al Jazeera, yang dimana termasuk salah satu saluran berita Arab yang paling populer, Al Jazeera ini sendiri berpusat di Qatar (Youssef, 2017).

Di sektor pangan, sekitar 80% kebutuhan pangan negara Qatar berasal dari negara – negara tetangga atau negara yang berada di kawasan Teluk, dengan hanya 1% diproduksi di dalam negeri Qatar dan bahkan untuk impor dari luar negara-negara Teluk biasanya melintasi perbatasan darat dengan Arab Saudi yang kini sudah ditutup oleh pihak Arab Saudi itu sendiri (Taylor, 2017). Berbeda dengan sikap negara Teluk lainnya, Iran justru melakukan hal sebaliknya yaitu memberikan sejumlah bantuan kepada Qatar dengan mengeksport makanan melalui jalur laut Iran. Teheran tidak hanya membantu dalam bidang pangan saja, Iran juga mempersilahkan wilayahnya untuk dilintasi oleh pesawat yang berasal dari negara Qatar (Muhaimin, 2017).

Iran juga menganggap langkah sejumlah negara Teluk dalam menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik terhadap Qatar ialah tidak adil. Presiden Iran menekankan bahwa pentingnya dialog regional Teheran dan Doha serta pengokohan kerjasama dan peningkatan lebih lanjut untuk konteks hubungan bilateral demi kepentingan bersama kedua negara. Sikap Iran yang berbeda itu membuat Emir Qatar, Syeikh Tamim bin Hamad Al Thani sangat mengapresiasi prinsip yang diyakini oleh Iran tersebut dalam mendukung negara Qatar menghadapi sanksi – sanksi yang tidak adil tersebut (Parstoday, 2017).

Dan pada tanggal 23 Agustus 2017, diumumkan bahwa pemerintah Qatar akan mengembalikan duta besarnya ke Teheran, Iran. Dalam sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri Qatar, Pemerintah Qatar menyatakan kesediaannya untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Iran setelah absen 20 bulan yang dimulai pada bulan Januari 2016, ketika Qatar menarik duta besarnya dari Teheran setelah serangan terhadap dua fasilitas diplomatik Saudi di Iran (Reuters S. , 2017).